

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2022.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memandang perlu melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2022. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melaksanakan perubahan RKPD Tahun 2022, yaitu:

1. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan serta realokasi anggaran dan refocusing pada kegiatan;
2. Penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah;
3. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
4. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2022;
5. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan alokasi pelaksanaan kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;

6. Penambahan/pengurangan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 1-2 keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan;
7. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan;
8. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah menyebabkan adanya penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi struktur organisasi baru;
9. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan III Tahun 2022.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- b. Perumusan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- c. Penetapan.

Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan acuan bagi Dinas Perhubungan dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun yang sama.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubagan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Parsial III Tahun 2022;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan melalui capaian target program dan kegiatan pembangunan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, landasan hukum pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan,

maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAN

Memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun berjalan sampai Triwulan III, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan (Tabel Evaluasi Triwulan III)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan Rioritas Pembangunan dan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorif pada perubahan dan disajikan dalam Tab Matrik

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN
DINAS PERHUBUNGAN

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian kinerjanya di tahun berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, dengan adanya evaluasi ini akan diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu sehingga akan dicapai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun berikutnya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta juga harus dilaksanakan evaluasi. Karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada Januari 2022, oleh karena itu yang disajikan merupakan perkiraan realisasi tahun 2022 Triwulan III sebagaimana tersebut dalam T-C29 terlampir:

Tabel 2.1 TC.-29

EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

KODE						PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR (sesuai RPJMD dan DPA)	APBD PARSIAL (sesuai DPA)			REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2022			SELISIH		CATATAN PERMASALAHAN
								Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu	Pagu	%	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10= (6-9)	11	
2	15					DINAS PERHUBUNGAN				20.630.625.498	PWK		14.260.730.314	6.369.895.184	30,88%	
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.060.312.818	PWK		12.380.377.114	5.679.935.704	31,45%	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.759.900	PWK		15.101.600	14.658.300	49,26%	
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	PWK	1 Dok	10.068.600	PWK	1 Dok	7.308.600	2.760.000	25,82%	
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	1 Dok	10.553.000	PWK	1 Dok	7.793.000	2.760.000	26,153%	
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	1 Dok	9.138.300	PWK	1 Dok	-	9.138.300	0%	
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.790.426.753	PWK		7.369.220.311	3.421.206.442	31,71%	
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jumlah gaji dan tunjangan ASN	PWK	14 bln	10.780.325.153	PWK	1 Dok	7.362.798.711	3.417.526.442	31,70%	
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	PWK	1 Dok	10.101.600	PWK	1 Dok	6.421.600	3.680.000	36,43%	
2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.450.950	PWK		-	10.450.950	0%	
2	15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	PWK	1 Dok	10.450.950	PWK	1 Dok	-	10.450.950	0%	
2	15	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				125.000.000	PWK		-	125.000.000	0%	
2	15	01	2	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi	Jumlah Dokumen Kebijakan Retribusi	PWK	1 Dok	125.000.000	PWK	1 Dok	-	125.000.000	0%	

Renja Parsial 2 dan 3 Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2022

2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.041.212.976	PWK		3.678.033.187	1.363.179.789	27,04%	
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	PWK	Lembar	2.000.000	PWK	200 lbr	2.000.000	-	100%	
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PWK	Bulan	127.305.000	PWK	3 Bulan	93.258.061	34.046.939	26,74%	
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji tenaga harian lepas, PTT, penjaga malam, pembantu penguji dan premi asuransi	PWK	Bulan	4.911.907.979	PWK	3 Bulan	3.582.775.126	1.329.132.850	27,60%	
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				382.050.000	PWK		211.726.000	170.324.000	0,004%	
2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	PWK	Paket	91.500.000	PWK	2 unit	52.743.400	38.756.600	42,36%	
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	PWK	Paket	237.800.000	PWK	3 unit	133.782.600	104.017.400	43,74%	
2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	PWK	Paket	52.750.000	PWK	3 bulan	25.200.000	27.550.000	52,13%	
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)				2.470.311.480	PWK		1.845.102.000	625.209.480	25,31%	
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				489.166.750	PWK		416.796.100	72.370.650	14,80%	
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	PWK	Persen	382.667.750	PWK	Persen	310.414.600	72.253.150	18,90%	
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	PWK	Persen	106.499.000	PWK	Persen	106.381.500	117.500	0,11%	
2	15	02	2	03		Pengelola Terminal Penumpang Tipe C				93.695.650	PWK		93.555.650	140.000	0,15%	
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal Tipe C	PWK	Persen	93.695.650	PWK	Persen	93.555.650	140.000	0,15%	

Renja Parsial 2 dan 3 Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2022

2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			130.030.100	PWK		94.961.250	35.068.850	27,00%	
2	15	02	2	04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor tersedia	PWK	Persen	54.999.350	PWK	Persen	54.766.200	233.150	0,42%
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelayanan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	PWK	Persen	75.030.750	PWK	Persen	40.195.050	34.835.700	46,42%
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			555.999.350	PWK		282.378.650	273.620.700	49,21%	
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji KIR	PWK	Unit	260.095.950	PWK	Unit	84.878.650	175.217.300	67,37%
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	PWK	Paket	200.823.650	PWK	Paket	197.500.000	3.323.650	1,66%
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat uji kendaraan	PWK	Unit	95.079.750	PWK	Unit	-	95.079.750	0%
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			896.485.950	PWK		843.392.650	53.093.300	5,92%	
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	PWK	Kegi	50.020.400	PWK	Keg	50.020.400	-	100%
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan	PWK	Kegi	796.512.250	PWK	Keg	793.372.250	3.140.000	0,40%

							dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 193 Tahun 2022 Dinas Perhubungan menyusun Program dan Kegiatan untuk Parsial Rencana Kerja yang terdiri dari 3 Program dan 19 Kegiatan 45 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.630.625.498,- dengan rincian indikasi Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - c. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

- f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.
 - g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
 - h. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - i. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Pelayaran
- a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Program dan Kegiatan dengan anggaran pada perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
MATRIKS RENCANA KERJA PARSIAL 2 DAN 3 DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

KODE						PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR (sesuai RPJMD dan DPA)	APBD MURNI (sesuai DPA)			PERUBAHAN TAHUN 2022		SELISIH		PERANGKAT DAERAH	
								Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	%		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(6-8)	10	11	
2	15					DINAS PERHUBUNGAN					20.630.625.498		21.734.025.498	1.103.400.000	5,077%	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.060.312.818		18.463.712.818	403.400.000	2,184%	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					29.759.900		29.759.900	0	0%	
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	PWK	100%	10.068.600	100%	10.068.600	0	0%		
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	100%	10.553.000	100%	10.553.000	0	0%		
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	100%	9.138.300	100%	9.138.300	0	0%		
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.790.426.753		10.790.426.753	0	0%	
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jumlah gaji dan tunjangan ASN	PWK	100%	10.780.325.153	100%	10.780.325.153	0	0%		
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	PWK	100%	10.101.600	100%	10.101.600	0	0%		
2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.450.950		10.450.950	0	0%	
2	15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	PWK	100%	10.450.950	100%	10.450.950	0	0%		
2	15	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					125.000.000		125.000.000	0	0%	
2	15	01	2	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan Retribusi	PWK	100%	125.000.000	100%	125.000.000	0	0%		

						Retribusi Daerah												
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				74.850.000		74.850.000	0	0%				
2	15	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	PWK	100%	25.000.000	100%	25.000.000	-	0%				
2	15	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PWK	100%	14.850.000	100%	14.850.000-	0	0%				
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan tersedia	PWK	100%	35.000.000	100%	35.000.000-	0	0%				
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.218.767.239		1.395.417.239	176.650.000	12.66%				
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	PWK	100%	52.140.450	100%	52.140.450	0	0%				
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	PWK	100%	148.900.000	100%	148.900.000	0	0%				
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	PWK	100%	50.969.450	100%	50.969.450	0	0%				
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik	PWK	100%	480.398.419	100%	657.048.419	176.650.000	26,89%				
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan pengandaan	PWK	100%	100.000.000	100%	100.000.000	0	0%				
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PWK	100%	24.989.720	100%	24.989.720	0	0%				
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan keluar daerah	PWK	100%	161.374.000	100%	161.374.000	0	0%				
2	15	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah menu/fitur sistem	PWK	100%	200.000.200	100%	200.000.200	0	0%				
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah				387.795.000		387.120.000	0	0%				
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Purwakarta	100%	387.795.000	100%	387.120.000	0	0%				
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.041.212.976		5.267.962.976	0	104%				
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat	Tersedianya jasa surat	PWK	100%	2.000.000	100%	2.000.000	0	0%				

						Menyurat	menyurat															
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PWK	100%	127.305.000	100%	354.055.000	226.750.000	64,04%								
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji tenaga harian lepas, PTT, penjaga malam, pembantu penguji dan premi asuransi	PWK	100%	4.911.907.976	100%	4.911.907.976	0	0%								
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					382.050.000		382.050.000	0	0%							
2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	PWK	100%	91.500.000	100%	91.500.000	0	0%								
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	PWK	100%	237.800.000	100%	237.800.000	0	0%								
2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	PWK	100%	52.750.000	100%	52.750.000	0	0%								
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)					2.470.311.480		3.170.311.480	700.000.000	22,08%							
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					489.166.750		489.166.750	0	0%							
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	PWK	100%	382.667.750	100%	382.667.750	0	0%								
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	PWK	100%	106.499.000	100%	106.499.000	0	0%								
2	15	02	2	03		Pengelola Terminal Penumpang Tipe C					93.695.650		93.555.650	0	0%							
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal Tipe C	PWK	100%	93.695.650	100%	93.695.650	0	0%								
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					130.030.100		94.961.250	0	0%							
2	15	02	2	04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor tersedia	PWK	100%	54.999.350	100%	54.999.350	0	0%								

						Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik												
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelayanan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	PWK	100%	75.030.750	100%	75.030.750	0	0%				
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					555.999.350		555.999.350	0	0%			
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji KIR	PWK	100%	260.095.950	100%	260.095.950	0	0%				
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	PWK	100%	200.823.650	100%	200.823.650	0	0%				
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat uji kendaraan	PWK	100%	95.079.750	100%	95.079.750	0	0%				
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					896.485.950		1.296.485.950	400.000.000	30,85%			
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	PWK	100%	50.020.400	100%	50.020.400	0	0%				
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	PWK	100%	796.512.250	100%	1.196.512.250	400.000.000	33,43%				
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	PWK	100%	49.953.300	100%	49.953.300	0	0%				
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					99.999.600		399.999.600	300.000.000	75%			
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Andalalin	PWK	100%	56.933.200	100%	356.933.200	300.000.000	84,04%				
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi	PWK	100%	43.066.400	100%	43.066.400	0	0%				

						Andalalin								
2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				74.996.120		74.996.120	0	0%
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PWK	100%	24.992.000	100%	24.992.000	0	0%
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	PWK	100%	25.019.400	100%	25.019.400	0	0%
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Umum	PWK	100%	24.984.720	100%	24.984.720	0	0%
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.030.600		100.030.600	0	0%
2	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program simaskot	PWK	100%	25.030.600	100%	25.030.600	0	0%
2	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rasio fasilitas penerbitan izin trayek	PWK	100%	75.000.000	100%	75.000.000	0	0%
2	15	02	2	14		Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				29.907.360		29.907.360-	0	0%
2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PWK	100%	29.907.360	100%	29.907.360	0	0%

2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN			100.001.200		100.001.200	0	0%	
2	15	03	2	06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota			100.001.200		100.001.200	0	0%	
2	15	03	2	06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data ASDP	PWK	100%	50.000.000	100%	50.000.000-	0	0%
2	15	03	2	06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	PWK	100%	50.001.200	100%	50.001.200	0	0%

BAB IV

PENUTUP

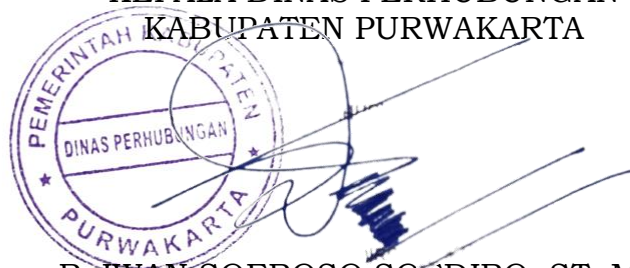
Penyusunan Renja Parsial 2 dan 3 Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan Renja Murni Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Parsial Renja ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat di Dinas Perhubungan.

Dokumen Rencana Kerja Parsial Tahun 2022 ini agar dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Semoga Rencana Kerja Parsial Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen ini.

Purwakarta, September 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM
NIP.19720228 200312 1 003

